



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM
KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

Oleh

NANIK MULYANI HIDAYAH

21701091140



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2021

RINGKASAN

Nanik Mulyani Hidayah, 2021, NPM 21701091140, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, **Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)** Dosen Pembimbing I : Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Dosen Pembimbing II : Suyeno, S.Sos., M.AP.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat di Desa Kebontunggul yang di dominasi oleh masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani yang membawa desa Kebontunggul pada pemberdayaan Kawasan Rumah Pangan Lestari. Meskipun demikian kemiskinan di desa Kebontunggul disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya adalah penghasilan rendah yang belum mencukupi kebutuhan dasar, produk unggulan belum terlembaga secara representatif, kemudian petani masih membutuhkan bimbingan dan fasilitas pola tanam dan infrastruktur yang baik, serta Usaha Mikro masih terkendala modal, kurangnya informasi pemasaran dan kurang keahlian dalam bidangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui bagaimana peran aktor dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari 2) Mengetahui manfaat pemberdayaan masyarakat desa melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari dan 3) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian yang bermaksud untuk memahamai fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan orang-orang tersebut dalam pembahasan dan peristilahannya. Jadi data-data yang diperoleh adalah kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari observasi, wawancara, catatan laporan, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktor dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program KRPL ini sudah di laksanakan sesuai dengan perannya, yaitu BPTP JATIM sebagai dinamisator, Pemerintah desa Kebontnggul sebagai fasilitator, masyarakat desa Kebontunggul sebagai pelaku utama pemberdayaan, manfaat yang didapatkan dari pemberdayaan masyarakat melalui program KRPL bisa dilihat dari segi organisasional, sosial, dan ekonomi, untuk faktor pendukung meliputi Sumber Daya Alamnya yang sesuai dengan kegiatan KRPL, sarana dan prasarana, dan desa Kebontunggul sering mendapatkan kunjungan, serta

faktor penghambat terletak pada motivasi masyarakat menurun, pemasaran produk yang dihasilkan.

Kata kunci : Pemberdayaan masyarakat, program KRPL, aktor, kendala



SUMMARY

Nanik Mulyani Hidayah, 2021, NPM 21701091140, Public Administration Study Program, Faculty of Administration, Islamic University of Malang, **Village Community Empowerment Through Sustainable Food House Area Programs in Improving Community Welfare (Case Study In Kebonunggul Village, Gondang District, Mojokerto Regency)** Lecturer Supervisor I: Dr.Nurul Umi Ati, M.AP, Supervisor II: Suyeno, S. Sos., M.AP.

This research is motivated by the community in Kebonunggul Village which is dominated by people whose livelihoods are farmers who bring Kebonunggul village to the empowerment of the Sustainable Food House Area. However, poverty in Kebonunggul village is caused by several aspects including low income that does not meet basic needs, superior products have not been representatively institutionalized, then farmers still need guidance and facilities for good cropping patterns and infrastructure, and Micro Enterprises are still constrained by capital, lack of information. marketing and lack of expertise in the field.

This study aims to 1) Knowing how the role of actors in empowering rural communities through the Sustainable Food House Area program 2) Knowing the benefits of empowering rural communities through the Sustainable Food House Area program and 3) Knowing the supporting and inhibiting factors in implementing village community empowerment through the Rumah Pangan area activities. Sustainable Food.

This study uses qualitative research methods, research that intends to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects with these people in their discussion and terminology. So the data obtained are words (not numbers) derived from observations, interviews, report notes, and documentation. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the role of actors in implementing community empowerment through the KRPL program has been carried out in accordance with their roles, namely BPTP JATIM as a dynamist, the Kebontgul village government as a facilitator, the village community of Kebonunggul as the main actor of empowerment, the benefits obtained from community empowerment through The KRPL program can be seen from an organizational, social, and economic point of view, for the supporting factors include Natural Resources that are in accordance with KRPL activities, facilities and infrastructure, and the Kebonunggul village often gets visits, and the



inhibiting factor lies in the community's declining motivation, marketing of the products produced .

Keywords: Community empowerment, KRPL program, actors, constraints



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar, yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam tersebut meliputi lahan yang subur, kandungan-kandungan yang termasuk dalam golongan tambang, dan ada juga minyak dan gas buminya. Namun, kekayaan sumber daya di Indonesia tidak menjadikan jaminan akan kemajuan perekonomian di Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki belum mampu membebaskan negeri ini dari jeratan kemiskinan. Berdasarkan data menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2020 mencapai 4,99 persen.

Sedangkan tingkat kemiskinan (presentase penduduk miskin dari seluruh penduduk) di Provinsi Jawa Timur pada Maret tahun 2020 mencapai 4.419.10 ribu jiwa (11,09 persen). Kemiskinan di Indonesia didominasi oleh wilayah pedesaan. Hal tersebut dapat diperkuat dengan data dari BPS yang memang menunjukkan bahwa tingginya angka kemiskinan di Indonesia berada pada wilayah Pedesaan. Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan 7,89 persen pada Maret 2020, sementara presentase penduduk miskin di daerah pedesaan 14,77 persen pada Maret 2020.

Merujuk data tersebut merupakan data terakhir yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Besarnya kemiskinan di pedesaan, mencerminkan bahwa proses pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi cenderung memberikan manfaat yang

lebih besar pada masyarakat perkotaan dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Untuk perbandingan jumlah penduduk miskin kota dan desa wilayah Provinsi Jawa Timur per Maret dari tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Pada Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah
2017	1.574.12	3.042.89	4.617.01
2018	1.457.61	2.874.97	4.332.59
2019	1.449.27	2.662.98	4.112.25
2020	1.682.14	2.736.97	4.419.11

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2019-2020

Todaro dan Stephen (2006:269) mengemukakan, salah satu generalisasi yang terbilang paling valid tentang penduduk miskin adalah bahwasanya mereka pada umumnya bertempat tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok dalam bidang pertanian dan kegiatan lainnya yang berkaitan erat dengan sektor ekonomi tradisional (biasanya dilakukan secara bersama-sama). Sejak lama telah diketahui bahwa sekitar dua pertiga penduduk miskin di negara-negara berkembang baik petani kecil maupun buruh tani yang berpenghasilan rendah. Selanjutnya, sepertiga penduduk miskin lainnya yang kebanyakan juga tinggal dipedesaan yang mengandalkan hidupnya dari usaha jasa kecil-kecilan. Hendrawati, (2018:32).

Yang perlu ditekankan adalah, karena sebagian besar penduduk miskin bermukim atau menetap di pedesaan, maka semestinya setiap kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, seharusnya sebagian besar di alokasikan pada program-program pembangunan pedesaan pada umumnya yaitu

melalui pembenahan sektor-sektor pertanian pada khususnya. Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, pedesaan memiliki persoalan kemiskinan lebih besar dibanding perkotaan, karena sebagian besar penduduk pedesaan bermata pencaharian di sektor pertanian, maka dapat dimaknai bahwa tingkat kemiskinan sektor pertanian kondisinya lebih banyak dibanding sektor lainnya. Hendrawati, (2018:33).

Tingkat kemiskinan tersebut salah satu penyebab pengangguran dan pendapatan masyarakat yang belum mencukupi kebutuhan pokok. Ada 3 hal penyebab kemiskinan menurut Kuncoro, yaitu 1) secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah, 2) perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, dan upahnya pun rendah, 3) sebab adanya perbedaan akses dan modal.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang ditolak oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya sangat sulit untuk dihindarkan. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan atau penanggulangan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga dan

anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemberdayaan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik (Anwas, 2014: 51).

Sumodiningrat (2009:48-49) mengemukakan bahwa, paradigma baru penanggulangan kemiskinan adalah berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata, partisipatif, demokratis mekanisme pasar, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pendekatan yang harus digunakan dalam penanggulangan kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan motivator dalam pembangunan. Selain itu, perlu adanya pendampingan kepada kelompok masyarakat miskin dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Bentuk pendampingan berupa fasilitasi, mediasi, dan advokasi yang sebaiknya dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat setempat. Peran pemerintah adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi proses kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Menurut Sulistiyani (2004) pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Aksi pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberikan daya atau kekuatan bagi masyarakat untuk dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Aksi pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan

untuk memandirikan masyarakat agar dapat menghadapi berbagai tantangan di kehidupannya. Pada dasarnya pemberdayaan memang sudah menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah. Hal itu tertuang pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Desa Kebontungul merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Kondisi ekonomi masyarakat Kebontungul tergantung pada penghasilan dari masyarakat itu sendiri. Desa Kebontungul memiliki penduduk yang didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, karena wilayah Desa Kebontungul didominasi oleh Pertanian dan Tegalan. Untuk pembagian wilayah Desa Kebontungul bisa dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2
Pembagian Luas Wilayah Desa Kebontungul

Pemukiman	22.400 Ha
Pertanian	142.220 Ha
Tegalan	73. 615 Ha
Fasum	24. 950 Ha

Sumber : Profil Desa Kebontungul (2020)

Banyaknya penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani membawa desa Kebontungul pada pemberdayaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kemiskinan di desa Kebontungul disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya

adalah penghasilan rendah yang belum mencukupi kebutuhan dasar, produk unggulan belum terlembaga secara representatif, kemudian petani masih membutuhkan bimbingan dan fasilitas pola tanam dan infrastruktur yang baik, serta Usaha Mikro masih terkendala modal, kurangnya informasi pemasaran dan kurang keahlian dalam bidangnya (RPJMDes Kebontunggul 2013-2019).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah desa Kebontunggul memberikan banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif khususnya para wanita, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti Kawasan Rumah Pangan Lestari, melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari yang tujuannya adalah mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan salah satu konsep yang berkaitan dengan lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan (Kementrian Pertanian, 2014). BKP (2010) yang dikutip oleh Saliem (2011: 1) menyebutkan kebijakan penganeekaragaman pangan diawali dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1974 tentang Upaya Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi Telo, Kacang dan Jagung yang dikenal dengan Tekad. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal yang dijadikan pedoman dalam melakukan kebijakan diversifikasi pangan.

Implementasi program dari kebijakan P2KP salah satunya diwujudkan melalui

kegiatan pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan atau yang dikenal dengan Rumah Pangan Lestari (RPL). “RPL merupakan rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam” (Kementrian Pertanian, 2012: 1). Kumpulan dari RPL yang berkembang dalam skala luas, berbasis dusun, desa atau wilayah pada akhirnya akan membentuk sebuah kawasan rumah pangan lestari (KRPL). “KRPL merupakan kawasan pengembangan aneka komoditas tanaman, ternak (unggas), ikan secara terpadu dipekarangan, fasilitas umum milik desa dan kanan kiri jalan desa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat desa dan sekaligus sebagai cadangan pangan hidup keluarga” (Badan Ketahanan Pangan Prov. Jatim, 2012: 1). Program KRPL merupakan program pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan yang dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan. Pengembangan KRPL diharapkan memenuhi kebutuhan pangan gizi dan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan secara lestari. Selain itu, dengan program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga untuk kebutuhan belanja pangan.

“Kegiatan optimalisasi pekarangan atau KRPL ini sudah dilakukan sejak tahun 2010, yang diawali dengan pembinaan terhadap 2000 desa. Sampai tahun 2013, telah dilakukan pembinaan terhadap 11.000 desa pada 497 kabupaten/ Kota di 33 provinsi” (Sekertaris Jendral Pertanian: 2013: 1). Pelaksanaan KRPL ini juga dilaksanakan di Jawa Timur atas permintaan Presiden Republik Indonesia maka pada tahun 2012

melalui Gubernur Jatim menginstruksikan stakeholder terkait untuk mengalokasikan program dan pembiayaan penumbuhan KRPL di tingkat Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur (BPTP Jatim, 2012: 2). Pelaksanaan KRPL di Jawa Timur juga didukung dengan kondisi yang ada di Jawa timur itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh BPTP Jatim (2012: 33) sebagai berikut:

Kondisi agroekologi di Jawa Timur yang sangat luas dan beragam merupakan potensi dalam penumbuhan semua kegiatan pertanian baik dalam skala luas maupun kecil. Berdasarkan analisis Location Quotient (LQ) diperkirakan pada tahun 2020 Propinsi Jawa Timur akan menjadi pusat agribisnis, karena mempunyai keunggulan di sektor pertanian. Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mempunyai nilai $LQ > 1$ di bidang pertanian yaitu Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Kediri, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Kota Batu. Pembangunan pertanian tidak dapat terlaksana hanya oleh para petani sendiri, akan tetapi perlu campur tangan pembuat kebijakan.

Lahan pekarangan kosong yang tidak produktif jika ditata dan dikelola dengan baik merupakan sumber potensial penyedia bahan pangan bernilai gizi bagi keluarga dan memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga meningkatkan penghasilan yang akan mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Kegiatan KRPL dikelola oleh kelompok dengan prinsip mampu mewujudkan kemandirian, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang akan berakhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pencapaian ketahanan dan kemandirian pangan secara rasional dimulai dari rumah tangga yang memanfaatkan lahan pekarangan. Pemanfaatan lahan pekarangan adalah salah satu cara untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Konsep ketahanan pangan selalu identik dengan ukuran kemandirian pangan,

yakni terpenuhinya kebutuhan pangan (nasional/kawasan) secara mandiri dengan memberdayakan modal manusia, sosial dan ekonomi (termasuk lahan pekarangan dan pertanian serta sekitarnya) yang dimiliki, dan berdampak kepada peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat/petani. Kemandirian pangan hanya dapat terwujud jika pembangunannya dilaksanakan atas dasar prakarsa (partisipatif aktif) masyarakatnya sendiri sebagai bentuk kesadaran untuk membangun ketahanan pangan yang andal.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan instruksi Gubernur Jatim tersebut. Kegiatan KRPL yang pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto terletak di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang. Dalam pelaksanaannya pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memberikan kewenangan melaksanakan kegiatan KRPL kepada instansi vertikal Kementerian Pertanian yang ada di daerah yaitu BPTP atau yang dikenal dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. KRPL di desa Kebontunggul merupakan binaan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur. Pendampingan dan pembinaan secara langsung oleh BPTP terhadap Kelompok Wanita Tani “Srikandi” dan kelompok masyarakat lainnya meningkatkan produktifitas pertanian anggota kelompok tani dalam program KRPL sehingga anggota dapat lebih mandiri dengan adanya pembinaan dan pendampingan dalam proses KRPL. Hasil yang didapatkan oleh anggota selain dikonsumsi sendiri juga dijual sehingga anggota dapat membeli kebutuhan yang tidak terpenuhi sebelumnya sehingga anggota menjadi mandiri dalam usaha pertanian. Fasilitas pemberdayaan untuk melaksanakan kegiatan KRPL antara

lain, melakukan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang didampingi oleh BPTP Jawa Timur, kemudian akses permodalan, serta terkait dengan pemasaran dari KRPL itu sendiri.

Kepala Badan Litbang Pertanian Dr.Haryono juga mengunjungi KRPL di desa Kebontunggul, Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Sabtu (4/8/2012). Kunjungan diterima oleh Kepala Desa Kebontunggul dan dilakukan pertemuan dengan Kelompok Wanita Tani (KWT). KRPL di desa Kebontunggul sudah dilakukan di empat dusun dan hal mencolok yang terlihat adalah aktivitas di KBD Kebontunggul yang sudah berperan mensuplai aneka bibit sayuran ke desa lainnya. Ibu-ibu KWT juga aktif dalam pengolahan aneka produk makanan seperti pembuatan keripik bayam, kripik jagung, jus jeruk dan minuman sari kedelai. Nampak di sekitar balai desa dan jalan desa pertanaman aneka sayuran dan toga tertata dengan rapi. (<https://www.litbang.pertanian.go.id/info-aktual/1235/>) (Diakses tanggal 4 April 2021).

Pembangunan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Desa Kebontunggul telah mencakup pembuatan green house dan kebun bibit sayur dan buah. Kebun Bibit Desa (KBD) sebagai pemasok aneka bibit sayuran mempunyai peran yang sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di desa Kebontunggul dan melayani pesanan di daerah lain dalam kabupaten Mojokerto bahkan sudah banyak pemesan bibit. Pemberdayaan pemerintah melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari memang sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada juga keseriusan baik dari pemerintah melalui BPTP, Pemerintah Desa, masyarakat maupun

lembaga terkait. Namun kendala-kendala serta masalah tetap dapat ditemukan, seperti kurangnya keterampilan dari masyarakat dan menurunnya semangat dari masyarakat dalam menjalankan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta kurangnya pemahaman pemasaran dari masyarakat, dsb. Diharapkan juga melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), masyarakat dan juga Kelompok Wanita Tani ini dapat lebih berdaya dalam segi hasil panen maupun finansial serta kesejahteraan hidupnya meningkat. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi pada Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto).**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk itu penulis merumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pemberdayaan masyarakat desa melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto?

C. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2011:152), penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan focus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan focus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusi fakta masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana gambaran pemberdayaan masyarakat desa melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - a. Peran aktor dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui program KRPL.
 - 1) Peran BPTP Jawa Timur dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui program KRPL.
 - 2) Peran Kepala Desa Kebontunggul dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui program KRPL.
 - 3) Peran masyarakat dalam melaksanakan program KRPL.
 - b. Manfaat pemberdayaan masyarakat desa melalui program KRPL dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - a. Faktor pendukung:

- 1) Sumber Daya Alam yang sesuai dengan program KRPL (kebutuhan air cukup, tanah yang subur, pekarangan cukup luas, termasuk dataran tinggi, suhu tidak terlalu ekstrim)
- 2) Sarana dan Prasarana
- 3) Desa Kebontunggul sebagai desa yang sering mendapatkan kunjungan (pejabat daerah, wisatawan, mahasiswa kkn)

b. Faktor penghambat:

- 1) Motivasi masyarakat menurun atau jenuh
- 2) Kurangnya informasi pemasaran produk hasil dari KRPL (serbuk jamu, dsb)

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan di atas maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian, diantaranya:

1. Mengetahui bagaimana gambaran pemberdayaan masyarakat desa melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbang pemikiran terhadap khasanah keilmuan pemberdayaan masyarakat melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
- b. Sebagai wacana dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema sama atau hampir sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Diharapkan menjadi masukan dan kontribusi positif bagi instansi terkait dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui program KRPL serta sebagai bahan informasi dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara tepat.

b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan bagi masyarakat sejauh mana program berjalan dan dijadikan motivasi/penggerak bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mendukung program pembangunan desa melalui pemberdayaan.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana peningkatan kemampuan ilmiah penulis, melalui teori-teori yang didapat dalam aspek pemerintahan, menambah pengetahuan penulis untuk dapat memahami lebih jauh bagaimana membantu dan memberdayakan masyarakat dengan memberikan kesempatan penulis untuk menerapkan teori, konsep-konsep yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan fokus permasalahan dapat dikatakan bahwa peran aktor dalam melaksanakan pemberdayaan melalui program KRPL yang ada di Desa Kebontunggul sudah menjalankan peran dan fungsi mereka masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat kesimpulan fokus dibawah ini:
 - a. Peran aktor dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui program KRPL
 - 1) Peran BPTP Jawa Timur adalah sebagai dinamisator. Sebagai dinamisator, pemerintah pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Pemerintah dalam hal ini BPTP Jawa Timur telah memberikan pelatihan, pendampingan, pembimbingan dan pengarahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari. Penyuluhan dari BPTP Jawa Timur dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, serta arahan dimanapun dan kapanpun kepada masyarakat Kebontunggul.
 - 2) Peran Pemerintah Desa Kebontunggul sebagai fasilitator, pemerintah berusaha

menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan, pihak pemerintah desa ikut mendampingi kegiatan anggota KWT yang tergabung dalam KRPL ketika ada kunjungan dan monitoring dari dinas terkait lainnya maupun BPTP Jawa Timur.

- 3) Peran Masyarakat (Kelompok Wanita Tani) merupakan pelaku utama atau sasaran dalam pemberdayaan melalui program KRPL. Keikutsertaan masyarakat yang tergabung dalam anggota KRPL dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari telah memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan pangan dan peningkatan pendapatan keluarga.
2. Berdasarkan manfaat yang telah dirasakan masyarakat Desa Kebontunggul baik itu dari sisi organisasional, sosial maupun ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut nampak dalam kesimpulan fokus dibawah ini
 - a. Dari sisi sosial melalui KRPL ini masyarakat bisa menumbuhkan kepeduliannya terhadap lingkungan, dapat meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga, meningkatkan penganekaragaman pangan dan meningkatkan kualitas gizi keluarga.
 - b. Sedangkan dari sisi ekonomi dapat mengurangi pengeluaran untuk belanja sayuran karena kebutuhan beberapa jenis sayuran dapat dipenuhi dari pekarangan sendiri dapa, meningkatkan pendapatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan dimasing-masing tingkat rumah tangga.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui program KRPL di desa Kebontunggul antara lain:
 - a. Faktor pendukungnya antara lain Sumber Daya Alam yang sesuai dengan program KRPL, sarana dan prasarana, desa Kebontunggul menjadi desa yang sering dikunjungi.
 - b. Faktor yang menghambat antara lain menurunnya motivasi masyarakat/ibu-ibu yang tergabung dalam KWT, serta pemasaran produk KRPL.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan serta faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BPTP Jawa Timur dan Pemerintah Desa Kebontunggul melalui program KRPL di Desa Kebontunggul maka peneliti memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Salah satu hambatan KRPL adalah motivasi masyarakat yang berjalannya waktu semakin menurun dan SDM memiliki pengetahuan terbatas terhadap teknologi serta adanya masyarakat yang masih belum tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan. Sehingga pihak terkait perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar dapat mengetahui perkembangan keberlanjutan pemberdayaan program KRPL dan apabila terdapat permasalahan dapat diidentifikasi dan ditemukan solusinya sesegera mungkin, pihak terkait juga harus lebih memberikan pendampingan dan pelatihan-pelatihan secara intensif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku KRPL. Diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi pelaku KRPL dalam menumbuhkembangkan KRPL,

seperti melakukan perlombaan atau bazar produk dari KRPL di setiap dusun di tingkat desa untuk mencari penumbuhkembangan KRPL yang terbaik. Hal tersebut berguna untuk memberikan apresiasi masyarakat pelaku KRPL tersebut.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi tertentu menyebabkan pemanfaatan teknologi sebagai sarana pemasaran belum maksimal. Masyarakat masih belum menguasai teknologi. Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, untuk itu perlu pembentukan kerjasama antara Kelompok KRPL dengan Kelompok Karang Taruna Desa Kebontunggul. Hal tersebut bisa dilakukan melalui pemerintah Desa Kebontunggul, mengingat peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam pemberdayaan. Karang Taruna berperan sebagai pengelola teknologi pemasaran berbasis online produk-produk KRPL sedangkan Kelompok KRPL sebagai pelaku yang memproduksi. Kelompok pemuda desa sifatnya yang penuh penasar terkait sesuatu yang baru, maka dari itu pengetahuan berkaitan dengan teknologi akan mampu secara cepat diserap oleh kelompok pemuda desa yang tergabung dalam Karang Taruna itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

Ardianto, Alif. 2011. *Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Fasilitator Dan Katalisator Dalam Usaha Pemulihan Sektor Usaha Kecil Dan Menengah Di Wilayah Erupsi Merapi 2010*.

Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.

Hayat & Raudhatul. 2018. *Pencanangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan*. Malang, Intelegensia Media

Hendrawati Hamid. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar, De La Macca (Anggota IKAPI Sulsel)

Mardikanto, Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik..* Bandung. ALFABETA.

Miles, M.B Huberman, A.M, dan Saldana J. 2014 *Qualitative Data Analysis, A Methods Soercebook*. USA. Terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Moleong, Lexy. 2006. *Metode Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.

Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan : Teori Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

Rulam Ahmadi. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Ar-Ruzz Media

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gava Media

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama

Sumodingningrat. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Barat

Sumber dari Jurnal

Eri Alfiah. 2020. *Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL) Dalam*

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Munggu Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Desy Nafilah. 2019. *Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.* Skripsi Universitas Islam Malang

Hilda Hidayatus. 2018. *Upaya Pningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Dusun Bulurejo Desa Kepuhrejo Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang.* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Triadinda, Trisnawati. 2016. *Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Sebagai Wujud Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (Studi di Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri).* Malang. Skripsi Universitas Brawijaya

Sumber Dokumen yang Dipublikasikan

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2020) *Presentase Penduduk Miskin 2020.* Surabaya. BPS Provinsi Jawa Timur

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian tentang Dasar Pelaksanaan Kawasan Rumah Pangan Lestari. 2013

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permetan/HK.140/4/2015 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul Desa

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. 2012. *Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (Rumah Hijau Plus-Plus).*

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim. 2014. Petunjuk Teknis Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari Plus Plus Jawa Timur Tahun 2014.

BPTP Jatim. 2012. Serba Serbi Kawasan Rumah Pangan Lestari Di Jawa Timur.

Kementerian Pertanian RI. 2019. Petunjuk Teknis Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019.

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021

